

**ANALISIS PENGUNGKAPAN INFORMASI BERBASIS WEB PADA PERUSAHAAN PUBLIK  
DI BURSA EFEK INDONESIA (SEBUAH STUDI ANALISIS KONTEN ATAS IMPLEMENTASI POJK  
NO. 8 TAHUN 2015)**Liza Alvia<sup>1a</sup>, Retno Yuni Nur Susilowati<sup>2b</sup>, R. Weddie Andriyanto<sup>3c</sup><sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampungliza.alvia@feb.unila.ac.id<sup>a</sup>, retnoyunins@gmail.com<sup>b</sup>, r\_weddie@yahoo.com<sup>c</sup>**INFO ARTIKEL**

Dikumpulkan: 26 Maret 2024;

Diterima: 10 Juli 2024;

Terbit: 30 Juli 2024;

Volume 29 Nomor 2,  
Juli 2024, pp. 116-125<http://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2577>**Corresponding author:**Retno Yuni Nur Susilowati  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Lampung  
e-mail: [retnoyunins@gmail.com](mailto:retnoyunins@gmail.com)**ABSTRACT**

*This research aims to explore the interplay between digital literacy, accounting skills, and the employability readiness of prospective accountants in the era of Industry 4.0. By delving into the aspects of digital skills and accounting competencies, the study not only contributes to understanding the dynamics of the accounting profession in the face of technological changes but also adds value to the development of relevant education and training strategies. The data collection method employed in this research involves the use of a questionnaire, with 92 respondents as the sample. The analysis tools utilized include Smart PLS 4.0 and MiniTab 19. The research findings indicate that, partially, accounting skills have a positive and significant influence on employability readiness. Similarly, digital literacy has a positive relationship with employability readiness. Simultaneously, accounting skills and digital literacy jointly influence the employability readiness of prospective accountants.*

**Keywords:** coercive institutional theory, content analysis, corporate disclosure, disclosure indexes, web-based reporting

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital dan sosial media yang berimplikasi pada perubahan lingkungan pengungkapan konvensional (paper based) ke pengungkapan digital (internet of things) (Miller & Skinner, 2015). Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) merespon pesatnya perubahan teknologi tersebut dengan menerbitkan POJK No. 8 Tahun 2015 tentang kewajiban emiten mengungkapkan informasi melalui situs web emiten di laman web perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengonfirmasi compliance theory atas implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 terhadap kinerja pengungkapan informasi korporasi berbasis web. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi ketaatan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dalam mengungkapkan (1) informasi umum emiten atau perusahaan publik; (2) informasi bagi pemodal atau investor; (3) informasi tata kelola perusahaan; dan (4) informasi tanggung jawab sosial pada laman website perusahaan pasca 5 (lima) tahun implementasi POJK No. 8 Tahun 2015. Penelitian ini mengembangkan Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) berbasis website melalui pendekatan analisis konten (content analysis) sesuai item pengungkapan POJK No. 8 Tahun 2015 pada 649 perusahaan go publik di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum kinerja IPIK perusahaan masih relatif rendah, yaitu 52%. Fenomena rendahnya kinerja IPIK menunjukkan bahwa respon managerial terhadap regulasi pengungkapan informasi korporasi berbasis web masih rendah. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dari pihak regulator menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja IPIK. Studi ini mengonfirmasi compliance theory atas respon managerial terhadap implementasikan POJK No. 8 Tahun 2015.*

**Kata Kunci:** teori institusional koersif, analisis konten, pengungkapan perusahaan, indeks pengungkapan, pelaporan berbasis web

**A. PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengonfirmasi regulasi POJK No. 8 Tahun 2015 terhadap kinerja pengungkapan informasi korporasi berbasis web menurut perspektif compliance theory. Penelitian ini menginvestigasi respon managerial terhadap regulasi pengungkapan informasi korporasi berbasis website. Isu utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketaatan managerial dalam mengungkapkan informasi korporasi

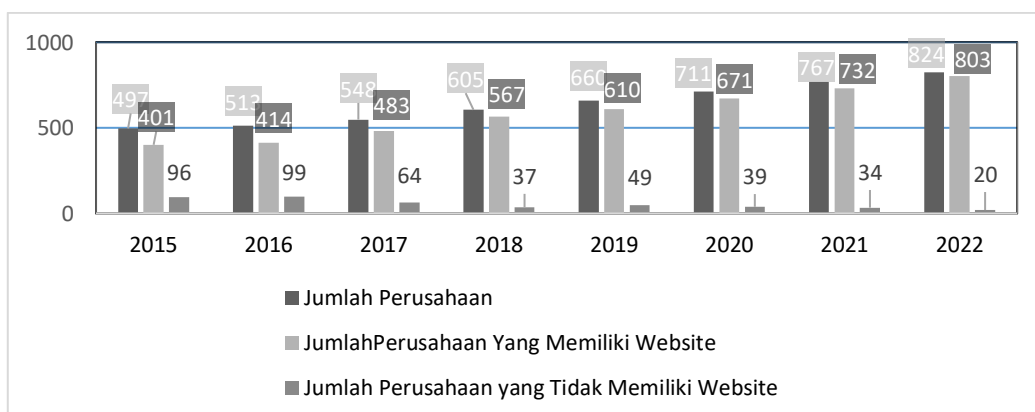
sesuai POJK No. 8 Tahun 2015 di laman website perusahaan sebagaimana dijelaskan dan diprediksi oleh coercive institutional theory.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan lingkungan pengungkapan informasi dari konvensional menjadi digital. Perubahan tersebut semakin menempatkan riset pengungkapan informasi akuntansi menjadi penting dan menjanjikan dalam literatur akuntansi (Blankespoor, 2018a; Cade, 2018a; Miller & Skinner, 2015). Informasi akuntansi yang diungkapkan melalui berbagai media pengungkapan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, pelaporan keuangan berbasis web, analisis diskusi manajemen, surat direktur, dan media pengungkapan lainnya merupakan informasi penting yang perlu dikomunikasikan secara efektif oleh manajer kepada investor (Merkl-davies & Brennan, 2017; De Souza, Antônio, Rissatti, & Rover, 2019). Studi terkini (Miller & Skinner, 2015) menunjukkan bahwa perubahan teknologi informasi digital berdampak pada pengguna (investor) dalam mengakuisisi dan memeroses informasi untuk membuat keputusan investasi. Dalam kondisi tersebut, pengguna perlu lebih cermat dalam menilai informasi yang relevan, kredibel, dan readable sebelum membuat keputusan investasi. Ketidaktercermatan investor dalam mencari, mengakuisisi, dan memeroses informasi dapat berdampak negatif dalam pembuatan keputusan investasi.

Karakteristik lingkungan pengungkapan digital ditandai oleh ketersediaan variasi informasi (informasi korporasi dan non korporasi), kecepatan akses informasi yang tinggi (real time access), dan ketersediaan ragam platform digital (website, facebook, twitter, instagram, youtube, dan lainnya) sebagai media pengungkapan informasi. Dalam penelitian ini, platform lingkungan digital difokuskan pada pengungkapan informasi berbasis web. Penggunaan platform pengungkapan informasi berbasis web didasarkan pada 4 (empat) pertimbangan yaitu: (1) di Indonesia, laporan keuangan berbasis web saat ini merupakan pengungkapan mandatori sesuai POJK No. 8 Tahun 2015; dan (2) studi empiris (Duo & Wei, 2015) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, termasuk pengungkapan informasi berbasis web, merupakan platform pengungkapan perusahaan yang paling diminati oleh pengguna yaitu 72%-89%; (3) masih sedikit riset (10%) yang mengangkat issue pengungkapan berbasis web (Sheng et al., 2017); dan (4) akses pengguna terhadap situs web perusahaan di Indonesia menduduki peringkat 9 tertinggi di dunia menurut hasil survei Google Trend 2018 (<https://trends.google.com/trends/explore?cat=12&q=corporate%20web>).

Praktek pengungkapan informasi berbasis web di Indonesia telah menjadi sebuah mandatori melalui POJK No. 8 Tahun 2015 sejak 1 Januari 2016. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) mewajibkan para emiten untuk menyajikan informasi pada laman web perusahaan. Informasi minimal yang harus diungkapkan oleh emiten meliputi 4 (empat) hal utama, yaitu: (1) informasi umum emiten, (2) informasi untuk pemodal atau investor, (3) informasi tata kelola, dan (4) informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Emiten lalu merespon POJK No. 8 Tahun 2015 dengan mengembangkan website Perusahaan sebagai media pengungkapan informasi korporasi. Data 7 (tujuh) tahun terakhir, yaitu 2015-2022 menunjukkan bahwa jumlah website perusahaan go public meningkat tajam dari 401 website pada tahun 2015 menjadi 803 pada tahun 2022. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan memanfaatkan website untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara transparan. Pada tahun 2022, masih terdapat 22 perusahaan go public belum memiliki website.



**Gambar 1** Jumlah Perusahaan yang Memiliki Website Tahun 2015-2022

Lima tahun pasca regulasi tersebut, belum ada penelitian yang mengevaluasi ketaatan managerial dalam mengungkapkan empat jenis informasi korporasi tersebut di laman *website* perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi umum emiten pada laman *website* perusahaan?
- 2) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi untuk pemodal atau investor pada laman *website* perusahaan?
- 3) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi tata kelola pada laman *website* perusahaan?
- 4) Bagaimana tingkat pengungkapan informasi tanggung jawab sosial pada laman *website* perusahaan?

Studi ini memberikan kontribusi signifikan, yaitu: **pertama** mengonfirmasi *compliance theory* dalam menganalisis respon managerial terhadap implementasikan POJK No. 8 Tahun 2015, **kedua** memperkaya bukti empiris sebagai pionir riset yang mengembangkan indeks pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*, **ketiga** kontribusi praktis bagi OJK RI dalam meningkatkan efektivitas POJK No. 8 Tahun 2015 dalam meningkatkan transparansi informasi korporasi di Indonesia dengan merumuskan pedoman teknis pengungkapan informasi berbasis *website*.

## B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN LANDASAN TEORITIS

### *Compliance Theory*

*Compliance theory* atau teori kepatuhan merupakan teori yang menggambarkan ketaatan individu/intitansi dalam mematuhi peraturan atau perintah dari atasan atau lembaga berwenang. Compliance dicirikan sebagai ketaatan yang digerakkan oleh keinginan untuk mendapatkan imbalan dan keinginan untuk tidak menerima hukuman (Kelman, 1956). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis perlu mengelola berbagai risiko secara andal, terutama risiko kepatuhan. Risiko yang diakibatkan oleh kegagalan perusahaan untuk mengikuti peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dikenal sebagai risiko kepatuhan. Jika perusahaan tidak taat, maka bisnis tersebut akan mendapat hukuman karena melanggar hukum yang dapat merusak reputasi perusahaan, jadi perusahaan harus menangani resiko kepatuhan.

Menurut Tyler dalam (Saleh & Susilowati, 2004) terdapat 2 (dua) pendekatan dasar tentang kepatuhan pada hukum, yaitu (1) pendekatan instrumental dan (2) pendekatan normatif. Menurut pendekatan instrumental, motivasi individu mentaati aturan lebih didasarkan pada kepentingan pribadi dan reaksi terhadap pemberian reward/punishment. Pendekatan normatif lebih berfokus pada apa yang orang anggap bermoral dan kontra produktif dengan kepentingan mereka sendiri. Dalam hal pengungkapan informasi melalui situs web, pendekatan instrumental menggambarkan bahwa insentif/reward yang diperoleh perusahaan bila mengungkapkan informasi perusahaan ke situs web yaitu terhindar dari sanksi/denda serta respon baik dari publik kepada perusahaan itu sendiri dan penalti/punishment yang didapatkan perusahaan. Sedangkan menurut perspektif kedua, seorang individu/intitansi cenderung untuk mematuhi ketentuan peraturan dalam hal ini adalah pengungkapan item informasi korporasi berbasis *website* merupakan peraturan yang bersifat mandatori melalui POJK NO. 8 Tahun 2015. Sebagai regulator, OJK bertugas mengawasi perilaku manager dalam merespon POJK tersebut. Kewenangan yang dimiliki OJK juga meliputi pemberian sanksi terhadap perilaku ketidaktaatan manager dalam mengungkapkan informasi korporasi.

Teori kepatuhan dapat memotivasi individu atau lembaga untuk mematuhi peraturan yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi korporasi berbasis *website* sesuai POJK No. 8 Tahun 2015. Kejelasan aturan dan ketegasan sanksi pada POJK tersebut dapat memberikan level enforcement yang lebih kuat sehingga memaksa emiten untuk mengungkapkan informasi korporasi di laman *website* perusahaan. Lima tahun setelah POJK No. 8 Tahun 2015 ditetapkan, belum ditemukan penelitian yang mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Ketidaktaatan perusahaan dalam mengungkapkan informasi tersebut dapat berdampak pada adanya penalti/punishment yang dapat membuat citra buruk kepada perusahaan.

### Respon Managerial terhadap Regulasi POJK No. 8 Tahun 2015

Tujuan pertama studi ini adalah untuk mengonfirmasi *compliance theory* terhadap implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 terhadap kinerja pengungkapan ketenagakerjaan. Menurut *compliance theory* bahwa level enforcement yang kuat, yaitu melalui implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengungkapan informasi korporasi. POJK No. 8 Tahun 2015 dikeluarkan sebagai respon atas kemajuan teknologi yang semakin pesat untuk meningkatkan transparansi informasi korporasi kepada publik. Ashbaugh et al. (1999) menunjukkan bahwa penggunaan *website* sebagai media pelaporan dapat menjangkau pengguna lebih banyak dan menyajikan informasi secara lebih rinci dibandingkan pelaporan konvensional berbasis paper based. Hal ini berimplikasi pada kemudahan akses oleh pengguna dalam mengawasi praktek pengungkapan informasi korporasi.

Penerbitan POJK No. 8 Tahun 2015 ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akses pemangku kepentingan atas informasi korporasi yang aktual dan terkini. POJK ini ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2015 dan

baru diberlakukan per tanggal 2 Januari 2016. POJK No. 8 Tahun 2015 terdiri dari 16 (enam belas) pasal. Secara umum, struktur pasal pada POJK No. 8 Tahun 2015 mengatur 4 (empat) hal, yaitu: (1) ketentuan umum, (2) informasi yang dimuat dalam situs web perusahaan, (3) ketentuan sanksi, dan (4) ketentuan peralihan. Fokus penelitian ini adalah menginvestigasi ketaatan managerial dalam mengungkapkan informasi yang dimuat dalam situs web perusahaan.

POJK No. 8 Tahun 2015 mewajibkan 4 (empat) jenis informasi korporasi yang wajib diungkapkan dalam situs web perusahaan, yaitu: informasi umum emiten, informasi untuk pemodal atau investor, informasi tata kelola, dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, informasi umum emiten meliputi: (a) nama dan kontak emiten, (b) riwayat singkat emiten, struktur organisasi emiten, (c) struktur kepemilikan emiten, (d) struktur grup emiten, (e) profil (direksi, dewan komisaris, dan komite), dan (f) dokumen anggaran dasar. Kedua, informasi untuk pemodal atau investor, meliputi: (a) prospektus, (b) laporan tahunan, (c) informasi keuangan, (d) informasi RUPS, (e) informasi saham, (f) informasi obligasi, (g) informasi dividen, (h) informasi aksi korporasi, dan (i) informasi fakta material lainnya. Ketiga, informasi tata kelola, meliputi: (a) pedoman kerja direksi dan dewan komisaris, (b) pengangkatan, pemberhentian, dan /atau kekosongan sekretaris perusahaan, (c) piagam unit audit internal, (f) kode etik, (g) pedoman kerja komite, (h) pengangkatan dan pemberhentian komite audit, (i) porosedur nominasi dan remunerasi, (j) kebijakan manajemen risiko, (k) kebijakan mekanisme pelaporan pelanggaran, (l) kebijakan anti korupsi, (m) kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur, (n) kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor. Keempat, informasi tanggung jawab sosial perusahaan, meliputi: (a) kebijakan, (b) jenis program, dan biaya, terkait aspek lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk atau jasa.

Studi terdahulu cukup banyak menunjukkan bahwa pengungkapan informasi berbasis website telah memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Menurut Hodge et al. (2004), secara konseptual, penggunaan teknologi XBRL pada web site dipandang sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan *performance* pengguna dalam menganalisis tugas keuangan, dan secara khusus, penggunaan *search-facilitating technology* dapat memudahkan user dalam memperoleh dan mengintegrasikan informasi. Wagenhofer (2003) menyatakan ketika perusahaan menyajikan informasi keuangan melalui website, maka pengguna dapat mencari, menyaring, mengambil, mengunggah, dan bahkan merekonfigurasi informasi dengan biaya dan waktu yang lebih efisien dan efektif. Selain itu pengguna pelaporan berbasis internet pengguna dapat memilih untuk mengakses informasi yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka karena Internet memungkinkan akses informasi yang tidak berurutan melalui penggunaan hyperlink, interaktivitas dan fasilitas pencarian (Basuony dan Mohamed (2014)) Beberapa peneliti lain mengkonfirmasi hal yang sama bahwa pengungkapan berbasis teknologi dapat bermanfaat bagi relevansi pelaporan keuangan Ashbaugh et al. (1999); meningkatkan kepercayaan diri dan akurasi keputusan (Tang et al. (2014); dan mengurangi asimetri informasi (Miller & Skinner (2015), dan Dai et al. (2015).

## C. METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi item-item pengungkapan informasi korporasi pada laman website perusahaan. Selanjutnya, hasil analisis konten tersebut dikembangkan untuk menyusun Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) di laman website perusahaan. Daftar item pengungkapan informasi dikembangkan dari POJK No. 8 dan No. 31 Tahun 2015. Periode analisis konten dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 16 Juni 2022.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analisis konten yang dilakukan pada seluruh perusahaan go publik di Indonesia sebagai populasi dan sampel penelitian dengan total perusahaan sebanyak 649 perusahaan yang terdiri dari subsector pertanian (6 subsektor), pertambangan (5 subsektor), industri dasar dan kimia (9 subsektor), aneka industri (7 subsektor), industri barang konsumsi (5 subsektor), properti, real estate dan konstruksi bangunan (3 subsektor), infrastruktur, utilitas, dan transportasi (6 subsektor), keuangan (5 subsektor), perdagangan, jasa, dan investai (9 subsektor).

### Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian ini adalah item pengungkapan informasi sesuai POJK No. 8 Tahun 2015. Terdapat 4 (empat) jenis informasi korporasi yang wajib diungkapkan dalam laman *website* perusahaan, yaitu: informasi umum

emiten, informasi untuk pemodal atau investor, informasi tata kelola, dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Secara rinci, sub item pengungkapan informasi disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Item Pengungkapan Informasi Korporasi

No	Item/Sub Item Pengungkapan	No	Item/Sub Item Pengungkapan
<b>A</b>	<b>Informasi umum emiten</b>	<b>C</b>	<b>Informasi tata kelola</b>
1	Nama dan kontak emiten	16	Pedoman kerja direksi dan dewan komisaris
2	Riwayat singkat emiten, struktur organisasi emiten	17	Pengangkatan, pemberhentian, dan /atau kekosongan sekretaris perusahaan
3	Struktur kepemilikan emiten	18	Piagam unit audit internal
4	Struktur grup emiten	19	Kode etik
5	Profil (direksi, dewan komisaris, dan komite)	20	Pedoman kerja komite
6	Dokumen anggaran dasar	21	Pengangkatan dan pemberhentian komite audit
<b>B</b>	<b>Informasi untuk pemodal atau investor</b>	22	Prosedur nominasi dan remunerasi
7	Prospektus	23	Kebijakan manajemen risiko
8	Laporan tahunan	24	Kebijakan mekanisme pelaporan pelanggaran
9	Informasi keuangan	25	Kebijakan anti korupsi
10	Informasi RUPS	26	Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur
11	Informasi saham	27	Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor
12	Informasi obligasi,	<b>D</b>	<b>Informasi tanggung jawab sosial perusahaan</b>
13	Informasi dividen,	28	Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek lingkungan hidup
14	Informasi aksi korporasi	29	Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek ketenagakerjaan
15	Informasi fakta material lainnya	30	Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait aspek pengembangan sosial dan masyarakat
		31	Kebijakan, Jenis program, dan Biaya terkait aspek tanggung jawab produk atau jasa.

Sumber: POJK No. 8 Tahun 2015

**Teknik Analisis Data**

Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) diukur berdasarkan kelengkapan pada setiap item pengungkapan. Setiap ketersediaan item pengungkapan yang tersedia di laman *website* perusahaan akan diberi skor 1 (satu), dan sebaliknya jika item pengungkapan tidak tersedia di laman *website* perusahaan maka diberi skor 0 (nol). Skor indeks dihitung menggunakan formula *indeks wallace*, yaitu membagi skor keseluruhan dengan skor tertinggi.

$$IPIK = \frac{\sum skor\ yang\ diperoleh\ perusahaan}{\sum skor\ maksimal}$$

**D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Demografi dan Statistika Deskriptif Sampel**

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis konten pada 649 *website* perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia (periode akses 17 Juli sampai dengan 16 Juni 2022) dengan sebaran data sebagai berikut.

**Tabel 2.** Demografi Sampel

No	Sektor	Sub-Sektor	Jumlah Perusahaan	No	Sektor	Sub-Sektor	Jumlah Perusahaan	
1	Pertanian	Tanaman Pangan	1	6	PPE & Konstruksi Bangunan	PPE & Real Estate	63	
		Perkebunan	21			Konstruksi Bangunan	18	
		Peternakan	1			Infrastrukt, Utilitas, & Transportasi	Energi	8
		Perikanan	3				Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya	6
		Kehutanan	0				Telekomunikasi	6
Lainnya	1	Transportasi	24					
2	Pertambangan	Batubara	22	8	Keuangan	Konstruksi Non Bangunan	14	
		Minyak & Gas Bumi	8			Perbankan	47	
		Logam & Mineral	11			Lembaga Keuangan	17	
		Lainnya				Lainnya	95	

No	Sektor	Sub-Sektor	Jumlah Perusahaan	No	Sektor	Sub-Sektor	Jumlah Perusahaan
3	Industri Dasar & Kimia	Batu2an	2	77	9	Perusahaan Sekuritas	6
		Semen	6			Asuransi	16
		Keramik, Porselin, & Kaca	8			Lainnya	9
		Logam & Sejenisnya	17			Perdagangan Besar	47
		Kimia	12			Barang Produksi	27
		Plastik & Kemasan	15			Perdagangan Eceran	36
		Pakan Ternak	4			Restoran, Hotel, & Pariwisata	19
		Kayu & Pengolahannya	4			Advertising, Printing, & Perangkatnya	7
		Pulp & Kertas	9			Kesehatan	10
4	Aneka Industri	Lainnya	2	51	9	Jasa Komputer & Perangkat Lainnya	9
		Mesin & Alat Berat	5			Perusahaan Investasi	10
		Otomotif & Komponennya	13			Perdagangan Lainnya	9
		Tekstil & Garmen	21				10
		Alas Kaki	2				
		Kabel	7				
		Elektronika	3				

### Statistika Deskriptif

Hasil uji statistika deskriptif pada 649 sampel perusahaan go publik di Indonesia disajikan pada Tabel 3. sebagai berikut.

**Tabel 3.** Statistika Deskriptif Sampel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Info Umum	649	,00	6,00	4,2111	1,69698
Info Investor	649	,00	9,00	5,1294	2,28087
GCG	649	,00	12,00	4,6795	3,46484
CSR	649	,00	4,00	2,4715	1,81205
Total	649	,00	31,00	16,4915	7,72524
IPIK (%)	649	,00	100,00	52,9569	24,74808
Valid N (listwise)	649				

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rerata Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) di laman *website* 649 perusahaan adalah: 52,96% dengan rerata jumlah pengungkapan intem informasi korporasi adalah 4,2 (dari 6 item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi umum; 5,1 (dari 9 item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi kepada investor; 4,6 (dari 12 item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi tata kelola perusahaan (GCG); dan 2,4 (dari 4 item pengungkapan) untuk pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Adapapun rerata total item pengungkapan adalah 16,49 dari 31 item yang wajib diungkapkan. Nilai minimum item pengungkapan untuk 4 jenis pengungkapan informasi korporasi di laman *website* adalah 0 (nol), artinya terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi korporasi tersebut di laman *website* perusahaan. Sedangkan nilai maksimum pengungkapan informasi berhasil mencapai nilai maksimal total pengungkapan untuk 4 jenis informasi yaitu: 6, 9, 12, dan 4 dengan total pengungkapan yaitu 31 berhasil diungkapkan oleh PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) dari Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sub Sektor Keramik, Porselin, & Kaca. Adapun standar deviasi atas kinerja IPIK perusahaan go publik adalah 24,74.

### Hasil Analisis Konten

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi respon manajerial terhadap pengungkapan informasi korporasi di laman *website* perusahaan (periode akses 17 Juli sampai dengan 16 Juni 2022), maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi kelengkapan item pengungkapan sesuai POJK No. 8 Tahun 2015. Hasil akhir dari analisis konten adalah terbentuknya Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) berbasis *website* perusahaan. Secara umum, hasil analisis konten terhadap kinerja pengungkapan korporasi di laman *website* 649 perusahaan di Bursa Efek Indonesia disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Analisis Konten Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK)

Item Pengungkapan Informasi Korporasi berbasis Website-(31)													
No	Sektor	Sub-Sektor	Jumlah Perusahaan	Informasi Umum (6)	%	Informasi untuk Investor (9)	%	CG (12)	%	CSR (4)	%	Total Skor (31)	IPIK
1	Pertanian	Tanaman Pangan	1	6,00	100%	7,00	78%	7,00	58%	0,00	0%	20,00	65%
		Perkebunan	21	4,55	76%	5,40	60%	4,95	41%	4,95	124%	19,85	64%
		Peternakan	1	2,00	33%	3,00	33%	0,00	0%	1,00	25%	6,00	19%
		Perikanan	3	3,33	56%	3,00	33%	2,33	19%	0,67	17%	9,33	30%
		Kehutanan	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
		Lainnya	1	4,00	67%	3,00	33%	1,00	8%	0,00	0%	8,00	26%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>27</b>	<b>3,31</b>	<b>55%</b>	<b>3,57</b>	<b>40%</b>	<b>2,55</b>	<b>21%</b>	<b>1,10</b>	<b>28%</b>	<b>10,53</b>	<b>34%</b>
2	Pertambangan	Batubara	22	4,41	73%	5,86	65%	5,18	43%	2,50	63%	17,95	58%
		Minyak & Gas Bumi	8	3,88	65%	5,50	61%	3,13	26%	2,50	63%	15,00	48%
		Logam & Mineral Lainnya	11	3,45	58%	4,45	49%	4,00	33%	2,27	57%	14,18	46%
		Batu2an	2	4,00	67%	4,00	44%	6,00	50%	1,50	38%	15,50	50%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>43</b>	<b>3,93</b>	<b>66%</b>	<b>4,95</b>	<b>55%</b>	<b>4,58</b>	<b>38%</b>	<b>2,19</b>	<b>55%</b>	<b>15,66</b>	<b>51%</b>
3	Industri Dasar & Kimia	Semen	6	5,00	83%	7,00	78%	9,50	79%	3,83	96%	25,33	82%
		Keramik, Porselin, & Kaca	8	4,63	77%	5,63	63%	5,50	46%	3,25	81%	19,00	61%
		Logam & Sejenisnya	17	3,53	59%	4,24	47%	5,00	42%	2,71	68%	15,47	50%
		Kimia	12	5,33	89%	5,17	57%	7,58	63%	3,25	81%	21,33	69%
		Plastik & Kemasan	15	3,80	63%	3,87	43%	4,00	33%	1,53	38%	13,20	43%
		Pakan Ternak	4	5,00	83%	5,25	58%	5,75	48%	4,00	100%	20,00	65%
		Kayu & Pengolahannya	4	5,25	88%	4,75	53%	4,75	40%	3,50	88%	18,25	59%
		Pulp & Kertas	9	3,33	56%	3,44	38%	3,22	27%	2,33	58%	12,33	40%
		Lainnya	2	5,50	92%	5,00	56%	6,50	54%	4,00	100%	21,00	68%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>77</b>	<b>4,60</b>	<b>77%</b>	<b>4,93</b>	<b>55%</b>	<b>5,76</b>	<b>48%</b>	<b>3,16</b>	<b>79%</b>	<b>18,44</b>	<b>59%</b>
4	Aneka Industri	Mesin & Alat Berat	5	1,40	23%	2,80	31%	1,60	13%	1,60	40%	7,40	24%
		Otomotif & Komponennya	13	4,46	74%	5,54	62%	4,54	38%	2,54	63%	17,08	55%
		Tekstil & Garmen	21	4,29	71%	4,05	45%	2,76	23%	2,43	61%	13,52	44%
		Alas Kaki	2	4,00	67%	6,00	67%	1,50	13%	2,00	50%	13,50	44%
		Kabel	7	4,71	79%	6,14	68%	6,43	54%	3,86	96%	21,14	68%
		Elektronika	3	4,00	67%	4,00	44%	5,33	44%	1,33	22%	14,67	47%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>51</b>	<b>3,81</b>	<b>64%</b>	<b>4,75</b>	<b>53%</b>	<b>3,69</b>	<b>31%</b>	<b>2,29</b>	<b>55%</b>	<b>14,55</b>	<b>47%</b>
5	Industri Barang Konsumsi	Makanan & Minuman	26	4,38	73%	5,08	56%	4,15	35%	2,77	69%	16,38	53%
		Rokok	5	5,40	90%	5,20	58%	6,20	52%	4,00	100%	20,80	67%
		Farmasi	10	5,40	90%	6,40	71%	6,30	53%	3,90	98%	22,00	71%
		Kosmetik & Barang	7	4,86	81%	5,86	65%	4,86	40%	3,43	86%	19,00	61%
		Keperluan Rumah Tangga											
		Peralatan Rumah Tangga	4	4,50	75%	5,00	56%	5,75	48%	2,50	63%	17,75	57%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>53</b>	<b>5,09</b>	<b>85%</b>	<b>5,76</b>	<b>64%</b>	<b>5,71</b>	<b>48%</b>	<b>3,27</b>	<b>82%</b>	<b>19,82</b>	<b>64%</b>
6	PPE & Konstruksi Bangunan	PPE & Real Estate	63	3,67	61%	5,10	57%	5,14	43%	2,67	67%	16,57	53%
		Konstruksi Bangunan	18	3,56	59%	5,78	64%	5,39	45%	2,89	72%	17,61	57%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>81</b>	<b>3,61</b>	<b>60%</b>	<b>5,44</b>	<b>60%</b>	<b>5,27</b>	<b>44%</b>	<b>2,78</b>	<b>69%</b>	<b>17,09</b>	<b>55%</b>
7	Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	Energi	8	5,00	83%	7,00	78%	5,88	49%	2,00	50%	19,88	64%
		Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya	6	4,83	81%	7,83	87%	6,33	53%	3,67	92%	22,67	73%
		Telekomunikasi	6	4,33	72%	6,67	74%	3,50	29%	2,17	54%	16,67	54%
		Transportasi	24	3,92	65%	5,33	59%	4,75	40%	2,71	68%	16,71	54%
		Konstruksi Non Bangunan	14	4,79	80%	6,43	71%	5,21	87%	1,86	31%	18,29	59%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>58</b>	<b>4,57</b>	<b>76%</b>	<b>6,65</b>	<b>74%</b>	<b>5,13</b>	<b>51%</b>	<b>2,48</b>	<b>59%</b>	<b>18,84</b>	<b>61%</b>
8	Keuangan	Perbankan	47	5,28	88%	6,62	74%	9,26	77%	2,45	61%	23,60	76%
		Lembaga Keuangan Lainnya	17	5,00	83%	5,47	61%	6,65	55%	2,71	68%	19,82	64%
		Perusahaan Sekuritas	6	4,67	78%	4,50	50%	6,00	50%	2,67	67%	17,83	58%
		Asuransi	16	5,00	83%	4,31	48%	6,50	54%	2,13	53%	17,94	58%
		Lainnya	9	5,11	85%	4,89	54%	6,22	52%	2,78	69%	19,00	61%
<b>Rerata IPIK</b>			<b>95</b>	<b>5,01</b>	<b>84%</b>	<b>5,16</b>	<b>57%</b>	<b>6,92</b>	<b>58%</b>	<b>2,54</b>	<b>64%</b>	<b>19,64</b>	<b>63%</b>
9	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Perdagangan Besar Barang	47	3,72	62%	4,79	53%	2,45	20%	1,55	39%	12,51	40%
		Produksi											
		Perdagangan Eceran	27	3,48	58%	4,63	51%	2,52	21%	2,15	54%	12,78	41%
		Restoran, Hotel, & Pariwisata	36	3,61	60%	4,22	47%	2,08	17%	2,08	52%	12,00	39%
		Advertising, Printing, & Perangkatnya	19	4,21	70%	4,47	50%	2,79	23%	1,74	43%	13,21	43%
		Kesehatan	7	3,86	64%	5,86	98%	3,14	52%	1,57	26%	14,43	47%
		Jasa Komputer & Perangkat	10	3,00	50%	4,00	67%	2,20	37%	1,30	22%	10,50	34%
		Lainnya											
<b>Rerata IPIK</b>			<b>165</b>	<b>3,81</b>	<b>64%</b>	<b>4,59</b>	<b>64%</b>	<b>2,42</b>	<b>30%</b>	<b>1,65</b>	<b>35%</b>	<b>12,48</b>	<b>40%</b>
<b>Rerata Kinerja IPIK (seluruh perusahaan)</b>			<b>649</b>	<b>4,24</b>	<b>71%</b>	<b>5,01</b>	<b>58%</b>	<b>4,55</b>	<b>40%</b>	<b>2,37</b>	<b>58%</b>	<b>16,16</b>	<b>53%</b>

Berdasarkan data hasil analisis konten pada Tabel 4 diketahui bahwa rerata kinerja pengungkapan informasi korporasi (IPIK) di laman *website* perusahaan adalah 53%. Kinerja ini dapat dikatakan rendah dari total nilai IPIK

100%. Secara spesifik, rerata pengungkapan untuk 4 jenis item pengungkapan informasi korporasi adalah sebagai berikut: (1) pengungkapan informasi umum (71%), informasi untuk investor (58%), informasi tata kelola perusahaan (CG) (40%), dan informasi tanggung jawab sosial (CSR) (58%).

Dari 9 (sembilan) dan 50 (lima puluh) sub sektor yang diinvestigasi, terdapat 5 (lima) sektor dan sub sektor dengan kinerja IPIK tertinggi dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5** Peringkat 5 (Lima) Kinerja IPIK Terbaik (Sektor-Sub Sektor)

Ranking	Sektor	Sub-sektor	IPIK
1	Industri Dasar & Kimia	Semen	82%
2	Keuangan	Perbankan	76%
3	Industri Barang Konsumsi	Lainnya	74%
4	Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya	73%
5	Industri Barang Konsumsi	Farmasi	71%

Dari 649 perusahaan yang diinvestigasi, terdapat 5 (lima) perusahaan dengan kinerja IPIK tertinggi dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6** Peringkat 5 (Lima) Kinerja IPIK Terbaik (Perusahaan)

Ranking	Sektor	Sub-sektor	Nama Perusahaan	IPIK
1	Pertanian	Perkebunan	PT Austindo Nusantara Jaya Agri Tbk (ANJT)	77%
2	Pertambangan	Batubara	PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS)	84%
3	Industri Dasar & Kimia	Keramik, Porselin, & Kaca	PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)	100%
4	Aneka Industri	Otomotif & Komponennya	PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)	97%
5	Industri Barang Konsumsi	Makanan & Minuman	PT Mayora Indah Tbk (MYOR)	94%
6	PPE & Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE)	81%
7	Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, & sejenisnya	PT XL AXIATA Tbk (EXCL)	84%
8	Keuangan	Perbankan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)	97%
9	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	Restoran, Hotel, & Pariwisata	PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM)	97%

## Diskusi dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis konten yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa setelah lima tahun implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 ditetapkan, rerata kinerja Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) di laman *website* perusahaan go publik Indonesia masih rendah yaitu 53% dari 100% kinerja maksimum. Rendahnya tingkat pengungkapan ini menunjukkan bahwa ketaatan manajer dalam mengungkapkan informasi di laman *website* perusahaan masih rendah. Menurut pendekatan *compliance theory* bahwa sebuah organisasi dapat menyesuaikan diri dengan praktik tertentu karena tekanan institusional (DiMaggio dan Powell, 1983). Kinerja IPIK yang rendah menunjukkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) yang seharusnya diperankan oleh OJK RI masih lemah, meskipun secara tersurat OJK melalui POJK No. 8 Tahun 2015 telah menyebutkan adanya sanksi atas ketidaktaatan emiten dalam mengungkapkan informasi korporasi di laman *website* perusahaan. Namun demikian, pernyataan dan aturan sanksi tidak cukup tanpa diiringi dengan monitoring dan pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh OJK minimal setiap 1 (satu) semester. Dengan kejelasan aturan dan ketegasan sanksi pada akan memberikan level *enforcement* yang lebih kuat sehingga memaksa emiten untuk mengungkapkan informasi korporasi di laman *website* perusahaan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menginvestigasi ketaatan managerial dalam mengungkapkan informasi korporasi di laman *website* perusahaan diperoleh hasil dan simpulan sebagai berikut:

- 1) Studi ini berhasil mengembangkan Indeks Pengungkapan Informasi Korporasi (IPIK) di laman *website* perusahaan melalui pendekatan analisis konten terhadap 31 item pengungkapan informasi korporasi sesuai



POJK No. 8 Tahun 2015;

- 2) Hasil analisis konten pada 649 perusahaan go publik dari 50 sub sektor industri di Indonesia, diketahui bahwa rerata IPIK masih rendah yaitu 53% dari kinerja maksimum 100%;
- 3) Secara khusus, kinerja IPIK untuk setiap jenis informasi yang wajib diungkapkan di laman *website* perusahaan adalah: pengungkapan informasi umum (71%), informasi untuk investor (58%), informasi tata kelola perusahaan (CG) (40%), dan informasi tanggung jawab sosial (CSR) (58%).

### Implikasi

Studi ini memberikan implikasi baik secara teoritis, empiris, dan praktis.

1. Implikasi teoritis, studi ini mengonfirmasi *coerchive theory* bahwa tekanan regulasi mampu menggerakkan perusahaan untuk beradaptasi dengan sebuah regulasi. Sebaliknya, jika penegakan hukum lemah, tekanan regulasi tidak signifikan, maka perusahaan cenderung mengabaikan regulasi tersebut.
2. Implikasi empiris, studi ini berhasil mengembangkan IPIK yang dapat digunakan pada pengembangan penelitian di masa mendatang dengan mengaitkan kinerja IPIK dengan berbagai variabel independen atau dependen lainnya.
3. Implikasi praktis, studi ini untuk pertama kalinya mengevaluais hasil implementasi POJK No. 8 Tahun 2015 dan merekomendasikan kepada OJK RI untuk melaksanakan upaya monitoring dan pengawasan melekat terhadap ketaatan manajerial atas POJK No. 8 Tahun 2015.

### Keterbatasan

Studi ini memiliki keterbatasan dalam mengukur kinerja pengungkapan informasi korporasi perusahaan karena IPIK berfokus mengukur ketaatan manajerial dalam mengungkapkan item informasi korporasi di laman *website* perusahaan secara matematis berbasis indeks, namun demikian belum dapat mengukur kualitas IPIK yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan pada masa mendatang dengan mengukur kualitas pengungkapan informasi korporasi di laman *website* perusahaan.

### REFERENSI

- Ashbaugh, H, K. Johnstone, dan Warfield T. 1999. Reporting on the Internet. *Accounting Horizons*.
- Alvia, Liza., Hartono, Jogiyanto., Ali, Syaiful., dan Nurhayati, Ratna. (2019a). Internet Financial Reporting Readability and Outside Information Credibility: Investors Valuation Judgment on Digital Disclosure Environment. *SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research at Osaka Japan*. Proceeding Volume (8).
- Alvia, Liza., Hartono, Jogiyanto., Ali, Syaiful., dan Nurhayati, Ratna. (2019b). *Information Disclosure Readability, Cognitive Style, And Investment Decision Making: A Web Experimental Study*. 3<sup>rd</sup> AICMBS International Conference, University of Brawijaya, Malang. Proceeding.
- Alvia, Liza., Hartono, Jogiyanto., Ali, Syaiful., dan Nurhayati, Ratna. (2019c). *Do investor assessments agree with academic judgment on information readability and credibility towards investment valuation?30th EBES International Conference, University of Malaya, Kuala Lumpur Malaysia*. Proceeding.
- Alvia, Liza., dan Hartono, Jogiyanto (2020). *Analysis of the Quality of Corporate Information Disclosure: Relevance, Credibility, and Readability in the Digital Disclosure Environment*. (A Critical Study on the Implementation of POJK No. 8 and 31 of 2015). 4<sup>rd</sup> ICEBE, University of Lampung, Malang. Proceeding.
- Alsohagy, M. H. (2013). Credibility of Financial Reporting Communication Between Investors and Management: An Exploratory Study. *International Journal on Business Review*, 2(3), 61–69.
- Asay, H. S., Elliott, W. B., & Rennekamp, K. (2017). Disclosure Readability and The Sensitivity of Investors' Valuation Judgments to Outside Information. *Accounting Review*, 92(4), 1–25. <https://doi.org/10.2308/accr-51570>
- Basuony, Mohamed A. K. Mohamed, Ehab K. A. 2014. Determinants of Internet Financial Disclosure in GCC Countries. *Asian Journal of Finance and Accounting*.
- Blankespoor, E. (2018). Firm Communication and Investor Response: A Framework and Discussion Integrating Social Media. *Accounting, Organizations and Society*, 68–69, 80–87. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.03.009>
- Brown, N., & Deegan, C. (1998). The Public Disclosure of Environmental Performance Information — a Dual Test of Media Agenda Setting Theory and Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, 29(1), 21–41. <https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564>
- Dai et al. 2015. The Governance Effect of the Media's News Dissemination Role: Evidence from Insider Trading. *Journal of Accounting Research*.
- Du, Hui & Jiang, Wei. 2015. Do Social Media Matter? *Initial Empirical Evidence*. *Journal of Information Systems*.
- Helfaya, A., Whittington, M., & Alawattage, C. (2019). Exploring the Quality of Corporate Environmental Reporting. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 32(1), 163–193. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2023>
- Hodge et al. 2004. Do search-facilitating technology improve the transparency of financial reporting? *The Accounting Review*.
- Kelman, H. C. (1956). *Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change*. Harvard University, 52-60.

- Merkel-davies, D. M., & Brennan, N. M. (2017). A Theoretical Framework of External Accounting Communication Research Perspectives, Traditions, and Theories. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 433-469. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2039>
- Miller, G. S., & Skinner, D. J. (2015). The evolving disclosure landscape: How changes in technology, the media, and capital markets are affecting disclosure. *Journal of Accounting Research*, 53(2), 221-239. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12075>
- Nekhili, Mehdi., Nagati, Haithem., Chtioui, Tawhid., Robolledo, Claudia. 2017. Corporate Social Responsibility Disclosure and Market Value: Family Versus Nonfamily Firms. *Journal of Business Research*.
- Otoritas Jasa Keuangan.(2015). POJK No. 8 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Indonesia
- Rennekamp, K. (2012). Processing Fluency and Investors' Reactions to Disclosure Readability. *Journal of Accounting Research*, 50(5), 1319-1354. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00460.x>
- Saleh, R., & Susilowati, I. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Strategi*, 67-77.
- Stone, G. W., & Lodhia, S. (2019). Readability of Integrated Reports: An Exploratory Global Study. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 32(5), 1532-1557. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2275>
- Tan, H. T., Wang, E. Y., & Zhou, B. (2015). How does readability influence investors' judgments? Consistency of benchmark performance matters. *Accounting Review*, 90(1), 371-393. <https://doi.org/10.2308/accr-50857>
- Tang et al. (2014). The Effects of Visualization and Interactivity on Calibration in Financial Decision-Making. *Behavioral Research in Accounting*.
- Wagenhofer, A. (2003). Economic Consequences of Internet Financial Reporting. *Schmalenbach Business Review*.